



# Rencana Kerja Tahu 2016

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

2016

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Rencana Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 dapat diselesaikan.

Menjadi catatan penting terkait dengan program kegiatan dalam rencana kerja pembangunan kehutanan bahwa dalam pelaksanaannya haruslah mendapatkan perhatian yang serius agar didapatkan tujuan dan sasaran serta target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya didalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh karena itu monitoring terhadap kegiatan tersebut harus berjalan sebagai kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatannya.

Adapun Buku Rencana Kerja kali ini dilaksanakan dalam ruang lingkup beberapa kegiatan terkait program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan dan program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS. Harapan kami bahwalaporan ini agar dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pembuat kebijakan dalam menetapkan program kegiatan di tahun yang akan datang sehingga didapatkan perencanaan pembangunan kehutanan yang lebih baik.

Pangkalpinang, Desember 2016  
KepalaKehutanan  
ProvinsiKepulauan Bangka Belitung,

Ir. Nazalyus, M.Si  
NIP. 19590824 198603 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Bab I    Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II    Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II.....	7
2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	31
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
Bab III   Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	54
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2016.....	54
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016.....	57
Bab IV    Penutup.....	92
Tabel     .....	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib memiliki dokumen perencanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka proses penyusunan Rancangan Perubahan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan agenda kerja pembentukan tim penyusunan Renja SKPD, orientasi mengenai Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Kedua penyusunan Rancangan Perubahan

Renja Perangkat Daerah yang meliputi tahapan kegiatan perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan tahapan penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini diperlukan keterkaitan dokumen perencanaan lainnya, Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibuat dengan mengacu pada Renstra PD dan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara keseluruhan harus sinkron dengan dokumen perencanaan RPJP Nasional, RPJD Daerah, RPJMD Daerah, selanjutnya Rancangan Perubahan Renja PD diimplementasi kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD sebagai penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal khusus pada Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 ini dilaksanakan berdasarkan Rasionalisasi Anggaran APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sesuai dengan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 093/530/DPPKAD tentang Penyampaian Rasionalisasi Kegiatan untuk Persiapan Penyusunan Perubahan APBD TA 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga mengakibatkan pengaruh yang berarti terhadap outcome/hasil dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara



- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  22. Rencana Strategis (renstra) 2012 -2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 adalah:

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 serta visi dan misi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Sebagai dokumen penjabaran Renstra SKPD dan pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016;
3. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2016.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 adalah Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisan. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016. Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja SKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Bab IV Penutup.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II.

Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 8 Program Kegiatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 63 kegiatan dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 26.156.732.639,73 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.643.771.679,73 sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp. 20.512.960.960,00. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 15.149.149.158,00 atau 57,92% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.007.583.481,73 (42,08%).

Sedangkan Tahun Anggaran 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 9 Program Kegiatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 56 kegiatan dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20.422.963.750,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.210.253.000,00 sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp. 14.212.710.750,00. Realisasi serapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 5.251.884.925,00 (25,72%).

Adapun perincian uraian belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel.1**

**Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015**

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISI K (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.893.005.627,00	5.643.732.640,00	100,00	4.694.297.784,00	83,18	949.473.896,00	16,82
A	GAJI DAN TUNJANGAN	2.751.368.627,00	3.655.319.680,00	100,00	2.993.638.576,00	81,90	661.681.104,00	18,10

B	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2.141.637.00 0,00	1.988.452.0 00,00	100, 00	1.700.659.20 8	85,53	287.792.79 2	14,47
---	--------------------------------	----------------------	----------------------	------------	-------------------	-------	-----------------	-------

**Tabel.2.**

**Realisasi Belanja Langsung Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung Tahun Anggaran 2015**

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
<b>II.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>20.360.010.9 60,00</b>	<b>20.512.960. 960,00</b>	<b>83,64</b>	<b>10.454.851. 374,00</b>	<b>50,97</b>	<b>10.058.109 .586,00</b>	<b>49,03</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.674.380.00 0,00</b>	<b>1.771.230.0 00,00</b>	<b>78,73</b>	<b>1.512.460.6 10,00</b>	<b>85,39</b>	<b>258.769.39 0,00</b>	<b>14,6 1</b>
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.000,0 0	23.550.000,0 0	60,00	13.556.660, 00	57,57	9.993.340,0 0	42,4 3
2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	199.800.000, 00	199.800.000, 00	100,0 0	113.781.900 ,00	56,95	86.018.100, 00	43,0 5
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	157.980.000, 00	176.280.000, 00	100,0 0	175.224.000 ,00	99,40	1.056.000,0 0	0,60
4	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	43.200.00,00	43.200.00,00	90,00	41.431.500, 00	95,91	1.768.500	4,09
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	42.500.000,0 0	42.500.000,0 0	70,00	26.538.000, 00	62,44	15.962.000	37, 56
6	Kegiatan Penyediaan	70.000.000,0 0	70.000.000,0 0	100,0 0	69.048.500, 00	98,64	951.500,00	1,36

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	Jasa Alat Tulis Kantor							
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Barang cetakan dan Pengadaan	60.000.000,00	60.000.000,00	70,00	42.535.000,00	70,89	17.465.000,00	29,11
8	Kegiatan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	70,00	22.875.000,00	76,25	7.125.000,00	23,75
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	20,00	14.056.000,00	28,11	35.944.000,00	71,89
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	504.000.000,00	604.000.000,00	86,00	521.514.050,00	86,34	82.485.950,00	13,66
11	Kegiatan penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	471.900.000,00	471.900.000,00	100,00	471.900.000,00	100,00	-	-
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.500.559.000,00</b>	<b>2.535.559.000,00</b>	<b>80,39</b>	<b>1.660.620.956</b>	<b>65,49</b>	<b>874.938.044</b>	<b>34,51</b>

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
1	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor	486.512.000,00	486.512.000,00	2,74	13.342.300,00	2,74	437.169.700,00	97,26
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	492.087.000,00	492.087.000,00	100,00	423.260.000,00	86,01	68.827.000,00	13,99
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	136.085.000,00	87,80	18.915.000,00	12,20
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	362.730.000,00	362.730.000,00	90,00	328.846.000,00	90,66	33.884.000,00	9,34
5	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	-	35.000.000,00	100,00	34.992.856,00	99,98	7.144,00	0,02
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	468.780.000,00	468.780.000,00	70,00	314.767.200,00	67,15	154.012.800,00	32,85
7	Pembuatan Taman Arboretum	535.450.000,00	535.450.000,00	100,00	409.327.600,00	76,45	126.122.400,00	23,55
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>58.400.000,00</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>74.853.000,00</b>	<b>94,15</b>	<b>4.647.000,00</b>	<b>5,85</b>
1	Pengadaan	38.400.000,00	59.500.000,00	100,00	57.800.000,00	97,14	1.700.000,00	2,86

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	00		0	
2	Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Resfonsif Gender Prov. Kep. Babel	20.000.000,00	20.000.000,00	90,00	17.053.000,00	85,27	2.947.000,00	14,74
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>244.000.000,00</b>	<b>244.000.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>205.212.200,00</b>	<b>84,10</b>	<b>38.787.800,00</b>	<b>15,90</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	151.200.000,00	151.200.000,00	100,00	130.269.200,00	86,16	20.930.800,00	13,84
2	Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan, Penyuluhan Kehutanan dan Penguatan Kelambagaan KTH	92.800.000,00	92.800.000,00	90,00	74.943.000,00	80,76	17.857.000,00	19,24
<b>E</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi</b>	<b>7.360.084.000,00</b>	<b>2.002.404.000,00</b>	<b>93,75</b>	<b>1.372.837.600,00</b>	<b>68,56</b>	<b>629.566.400,00</b>	<b>31,44</b>

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	<b>Sumber daya Hutan</b>							
1	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	235.180.000,00	235.180.000,00	100,00	234.585.900,00	99,75	594.100,00	0,25
2	Sosialisasi HTI, HTR dan peredaran hasil hutan	206.000.000,00	206.000.000,00	100,00	195.796.200,00	95,05	10.203.800,00	4,95
3	Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00	143.968.000,00	92,29	12.032.000	7,71
4	Observasi lapangan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL)	127.224.000,00	127.224.000,00	100,00	123.535.000,00	97,10	3.689.000,00	2,90
5	Pengembangan hasil hutan bukan kayu tanaman mangrove	141.000.000,00	141.000.000,00	100,00	129.670.000,00	91,96	11.330.000,00	8,04
6	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pengelolaan dan	851.000.000,00	851.000.000,00	50,00	289.367.000,00	34,00	561.633.000,00	66,00



NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	pemasaran hasil hutan bukan kayu							
7	Sosialisasi hutan adat dan kelekak kelukoi	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00	77.437.400,00	90,04	8.562.600,00	9,96
8	Bimbingan teknis penguatan pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	178.478.100,00	89,24	21.521.900,00	10,76
<b>F</b>	<b>Program Rehabilitasi hutan dan lahan</b>	<b>7.360.084.000,00</b>	<b>7.360.084.000,00</b>	<b>43,60</b>	<b>1.236.488.200,00</b>	<b>16,80</b>	<b>6.123.595.800,00</b>	<b>83,20</b>
1	Fasilitasi Penangkaran Benih/bibit tanaman hutan di prov. Kepulauan	182.820.000,00	182.820.000,00	75,00	92.826.800,00	50,77	89.993.200,00	49,23
2	Pembuatan siteplan pengelolaan ekosistem mangrove di pulau bangka	391.000.000,00	391.000.000,00	6,65	27.344.700,00	6,99	363.655.300,00	93,01
3	Pembinaan	499.910.000,00	499.910.000,00	25,00	75.347.900,00	15,07	424.562.100,00	84,9

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	dan pemeliharaan hutan kemasyarakatan (HKM) dan kelekak kelukoi	00	00		00		0,00	3
4	Pemeliharaan dalam rehabilitasi DAS pada IPPKH pantai timur prov. Kep. Babel	891.200.000,00	891.200.000,00	5,86	52.204.700,00	5,86	838.995.300,00	94,14
5	Fasilitasi dan pemeliharaan pilot project reklamasi lahan eks tambang liar tahun 2014 di prov. Kep. Babel	932.800.000,00	932.800.000,00	9,35	87.198.800,00	9,35	845.601.200,00	90,65
6	Pembangunan dan rapat koordinasi hutan desa dan hutan kemasyarakatan se provinsi kep. Babel	193.300.800,00	193.300.800,00	100,00	177.843.300,00	91,77	15.956.700,00	8,23
7	Pemeliharaan	1.030.984.00	1.030.984.00	10,00	81.491.800,00	7,90	949.492.20	92,1

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	tanaman rehabilitasi lahan kritis dan pembinaan kelompok tani hutan	0,00	0,00		00		0,00	0
8	Soialisai perbenihan tanaman hutan di pro. Kep. babel	71.460.000,00	71.460.000,00	100,00	64.786.400,00	90,66	6.673.600,00	9,34
9	Pembangunan pilot project aqua culture di kawasan mangrove di prov. Kep. babel	2.666.200.000,00	2.666.200.000,00	4,13	110.044.500,00	4,13	2.556.155.500,00	95,87
10	Penanaman 1 (satu) milyar pohon	499.910.000,00	499.910.000,00	100,00	467.399.300,00	93,50	32.510.700,00	6,50
<b>G</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>	<b>3.614.720.000,00</b>	<b>3.614.720.000,00</b>	<b>84,11</b>	<b>1.886.418.203,00</b>	<b>52,19</b>	<b>1.728.301.797,00</b>	<b>47,81</b>
1	Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel	1.215.720.000,00	1.215.720.000,00	35,00	305.714.903,00	25,15	910.005.097	74,85

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
2	Pendataan dan inventarisasi penertiban peredaran satwa dan tumbuhan liar dan fasilitasi penangkaran	356.000.000,00	356.000.000,00	100,00	253.448.700,00	71,19	102.551.300,00	28,81
3	Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov. Kep. Babel	479.620.000,00	479.620.000,00	60,00	243.179.200,00	50,70	236.440.800,00	49,30
4	Pelatihan pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	206.000.000,00	206.000.000,00	100,00	153.592.700,00	74,55	52.407.300,00	25,44
5	Pengelolaan tahura emas G. mangkol	506.000.000,00	506.000.000,00	77,00	290.345.000,00	57,38	215.555.000,00	42,62
6	Operasional polisi hutan	91.500.000,00	91.500.000,00	95,00	70.800.000,00	77,38	20.700.000,00	22,62
7	Penilaian lomba PKA wana lestari	165.480.000,00	165.480.000,00	100,00	52.864.400,00	31,95	112.615.600,00	68,05
8	Pembinaan dan pengawasan batas kawasan hutan	270.200.000,00	270.200.000,00	100,00	247.448.800,00	91,58	22.751.200,00	8,42

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
9	Fasilitasi status kawasan hutan	324.200.000,00	324.200.000,00	90,00	269.024.500,00	82,98	55.175.500,00	17,02
<b>H</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>	<b>2.905.463.960,00</b>	<b>2.905.463.960,00</b>	<b>98,57</b>	<b>2.505.960.605,00</b>	<b>86,25</b>	<b>399.503.355,00</b>	<b>13,75</b>
1	Kegiatan operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan	90.558.000,00	90.558.000,00	100,00	79.603.630,00	87,90	10.954.370,00	12,10
2	Rapat koordinasi perencanaan kehutanan	158.800.000,00	158.800.000,00	100,00	153.571.000,00	96,71	5.229.000,00	3,29
3	Evaluasi penggunaan kawasan hutan	194.612.000,00	194.612.000,00	100,00	168.467.800,00	86,57	26.144.200,00	13,43
4	Rekonsiliasi data dan informasi kehutanan pembangunan kehutanan se-Provinsi Kep. Babel	667.480.000,00	667.480.000,00	100,00	606.428.545,00	90,85	61.051.455,00	9,15
5	Sosialisasi	146.058.520,00	146.058.520,00	100,00	140.929.300,00	96,49	5.129.220,00	3,51

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	pemenuhan kewajiban dan penyusunan basis data izin pinjam pakai kawasan hutan	00	00	0	,00		0	
6	Konsultasi publik rencana pengelolaan dan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) model	285.820.000,00	285.820.000,00	100,00	274.698.100,00	96,11	11.121.900,00	3,89
7	Sinkronisasi subtansi kehutanan dalam penataan ruang daerah	86.508.000,00	86.508.000,00	100,00	81.775.600,00	94,53	4.732.400,00	5,47
8	Identifikasi usulan perubahan kawasan hutan daerah	427.573.440,00	427.573.440,00	80,00	257.673.830,00	60,26	169.899.610,00	39,74
9	Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	118.108.000,00	78,74	31.892.000,00	21,26
10	Bimbingan teknis dan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	124.611.400,00	83,07	25.388.600,00	16,93

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
	penyusunan neraca sumber daya hutan							
11	Rapat koordinasi penyelesaian permasalahan batas kawasan hutan	79.006.000,00	79.006.000,00	100,00	72.881.200,00	92,25	6.124.800,00	7,75
12	Pemantapan kawasan hutan	111.508.000,00	111.508.000,00	100,00	105.900.000,00	94,17	6.502.100,00	5,83
13	Rapat koordinasi teknis kepala dinas kab/kota se-provinsi kep.babel	213.700.000,00	213.700.000,00	100,00	190.486.600,00	89,14	23.213.400,00	10,86
14	Penyiapan kelembagaan dan pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Prov. Kep. Babel	143.840.000,00	143.840.000,00	100,00	131.719.700,00	91,57	12.120.300,00	8,43
<b>JUMLAH</b>		<b>25.253.016.587,00</b>	<b>26.156.732.640,00</b>	<b>91,82</b>	<b>15.149.149.158,00</b>	<b>57,92</b>	<b>11.007.583.482</b>	<b>42,08</b>

**Tabel 3**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Perkiraan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

PD: Dinas Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD tahun 2016)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sampai dengan tahun Berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan wajib									
Bidang urusan kehutanan									
<b>Program administrasi perkantoran</b>									



- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan surat menyurat yang terkirim, setiap tahun	95	71	12	12	100%	12	95	100%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik setiap tahun	96	72	12	12	100%	12	96	100%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan	54	40	7	7	100%	7	54	100%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor, 4 orang per tahun	36	28	4	4	100%	4	36	100%

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan peralatan kerja kantor yang diperbaiki setiap tahun	63	49	7	7	100%	7	63	100%
- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah bulan ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK) setiap tahun (12 bulan)	92	68	12	12	100%	12	92	100%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan setiap tahun	90	64	12	12	100%	12	94	97,8%
- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan ketersediaan bahan logistik kantor	24	0	12	12	100%	12	24	100%

- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat pegawai setiap tahun	90	64	12	12	100%	12	88	97,8%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah setiap tahun	86	45	12	12	100%	14	71	82,6%
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
- Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer	26	1	6	6	100 %	6	13	50%
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor setiap tahun	90	58	12	12	100%	12	82	91,1%

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas dan kendaraan bermotor yang dipelihara	96	60	12	12	100%	12	84	87,5%
<b>Program peningkatan Disiplin Aparatur</b>									
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	346	58	112	112	100%	58	228	65,6%
Urusan Pilihan									
<b>Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan</b>									
- Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Prosentase peningkatan pemanfaatan	4 %	1 %	1 %	1 %	100%	1 %	3 %	75%

	HHBK								
- Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Prosentase peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan	20 %	5 %	10 %	10 %	100 %	5 %	20 %	100%
- Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Prosentase penerimaan PNBP	4 %	2 %	2 %	2 %	100%	2 %	6 %	150 %
- Sosialisasi HTI, HTR dan Peningkatan Tertib Peredaran dan luran Hasil Hutan	Jumlah luas areal pencadangan izin pemanfaatan hutan tanaman	880 Ha	220 Ha	220 Ha	220 Ha	100 %	200 Ha	640 Ha	72,72%
<b>Program Rehabilitasi</b>									

Hutan dan Lahan									
- Pembuatan masterplan Tahura Kawasan Konservasi Gunung Mangkol	Dokumen master plan Tahura	1 dokumen	0	1	1	100%	0	1	100%
- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan dalam rangka Rehabilitasi Lahan Kritis di Prov. Kep. Bangka Belitung	Menurunnya luas lahan kritis di Bangka Belitung	400 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 %	100 Ha	300 Ha	75 %
- Pelestarian Kearifan Lokal Kelekak Kelukoi dan Hutan Kemasyarakatan									
- Pilot Project Lahan Eks Tambang Liar di Prov. Kep. Bangka Belitung									

- Rehabilitasi DAS dalam rangka Pemenuhan Kewajiban IPPKH untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka										
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>										
- Operasional Petugas Polisi Hutan - Fasilitas Pengamanan Hutan Swakarsa Prov. Kep. Babel - Sosialisasi UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan	Prosentase penanganan tindak pidana hutan	70 %	20 %	20 %	20 %	100%	20 %	60 %	85,7%	

Perusakan Hutan									
- Pengumpulan dan Penyusunan Data-Data Flora dan Fauna Endemik Langka di Prov. Kep. Babel	Data base flora fauna dan habitatnya	2 (Jenis)	0	1	1	100%	1	2	100 %
- Inventarisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dalam Kawasan Hutan - Pembuatan DED Ekosistem Mangrove	Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	9	2	3	2	66,6%	2	6	66,7%
<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>									
- Operasional Peralatan GIS dan peralatan pendukung pengukuran	Prosentase pelayanan publik tentang	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %



dan perpetaan	perpetaan kawasan hutan								
- Rapat Koordinasi Perencanaan Kehutanan	Dokumen perencanaan tahunan	4	1	1	1	100%	1	3	75%
- Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan									
- Pelatihan Aplikasi GIS Tingkat Lanjut untuk pemetaan kawasan Hutan bagi Aparat Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta aparatur kecamatan yang faham terhadap ilmu peta	150	30	40	40	100 %	40	110	73,3 %
- Rapat Koordinasi Teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota se-Prov. Kep. Bangka Belitung	Dokumen	2	0	0	0	0%	1	1	50%
- Sosialisasi dan	Jumlah draft	5	1	1	1	100%	2	4	80%

Sinkronisasi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi - Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan RKT	RKT									
- Observasi Lapangan Operasional KPH Model)	KPH Model	3	0	1	1	100%	2	3	100 %	
<b>- Program Peningkatan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>										
- Rekonsiliasi Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Prov. Kep. Babel	Dokumen	3	1	1	1	100%	1	3	100 %	

<b>Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat</b>									
- Penyusunan Data-Data Reklamasi Pasca Tambang di Prov. Kep. Babel	Dokumen	2	0	1	1	100%	0	1	50 %

## 2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Kurang proporsionalnya penempatan pegawai terkait dengan jumlah dan kompetensi yang dimiliki.
2. Tumpang tindihnya tugas antar lingkup sub bagian pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur, terutama Gedung Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kurang representatif.
4. Kurangnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan antara Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tata batas dan penyusunan neraca sumber daya hutan, karena terjadi beberapa perubahan kewenangan;
2. Pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam, karena wisata alam dan jasa lingkungan belum dijadikan aset dalam *eco tourism* sebagai pendukung destinasi wisata;
3. Rehabilitasi hutan dan lahan, dikarenakan besarnya tekanan terhadap hutan untuk kegiatan penambangan tidak diikuti dengan penegakan hukum dan penyediaan anggaran yang memadai;
4. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial, faktor penyebab adalah proses perizinan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi berperan dalam fasilitasi .

### 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD tahun 2016 dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan tahun 2015. Proses perbandingan ini dilakukan agar Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki informasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD.

Pada tabel 4 (empat) review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 dapat dilihat bahwa usulan program yang direncanakan sebanyak 9 (sembilan) program dengan 56 (lima puluh enam) kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 14.212.710.750,00- (empat belas milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Hasil analisis kebutuhan yang merupakan realisasi program dan kegiatan tahun 2015 terdiri atas 8 (delapan) program dengan 63 (enam puluh tiga) kegiatan senilai Rp. 20.512.960.960,00,- (dua puluh milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Dari 56 (limapuluh enam) kegiatan, ada 9 (satu) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan beberapa permasalahan yakni :

1. Beberapa Kegiatan terkait pengadaan bibit tanaman tidak dapat dilaksanakan, disebabkan adanya badai elnino yang mengakibatkan kemarau panjang dan pada awal Desember 2015 hujan belum stabil, yaitu :
  - a. Kegiatan Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Kelelak Kelukoi alokasi anggaran sebesar Rp499.910.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp75.347.900,- atau 15,07%
  - b. Kegiatan Pemeliharaan dalam rehabilitasi DAS pada IPPKH pantai Lingkar Timur di Prov. Kep. Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp891.200.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp52.204.700,- atau 5,86%.
  - c. Kegiatan Fasilitas dan Pemeliharaan Pilot Project Reklamasi Lahan Eks Tambang Liar Tahun 2014 di Prov. Kep. Bangka Belitung dengan alokasi

- anggaran sebesar Rp932.800.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp87.198.800,- atau 9,35%.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kritis dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.030.984.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp81.491.800,- atau 7,90%.
  - e. Kegiatan Pembangunan Pilot Project Aqua Culture di Kawasan Mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pilot Project Silvofishery di Kawasan Mangrove di Prov. Kep. Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.666.200.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp110.044.500,- atau 4,13%.
2. Beberapa kegiatan tidak terealisasi disebabkan karena gagal lelang, yaitu :
- a. kegiatan pembuatan siteplan pengelolaan ekosistem mangrove di pulau Bangka dengan alokasi anggaran sebesar Rp391.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp27.344.700,- atau 6,99%.
  - b. Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu dengan alokasi anggaran sebesar Rp851.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp289.367.000,- atau 34,00 %.
  - c. Penyusunan DED pembangunan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp486.512.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.13.342.300,- atau 2,74%.
3. Permasalahan untuk Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Prov. Kep. Bangka Belitung yaitubelum maksimalnya tugas Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.215.720.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp305.714.903,- atau 25.15%.

**Tabel 4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**SKPD: Dinas Kehutanan**

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	30.000.000	- Penyediaan jasa surat menyurat	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	30.000.000	

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	114.000.000	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	114.000.000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	106.370.000	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	106.370.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	43.200.000	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	43.200.000
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	47.800.000	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	47.800.000
- Penyediaan Alat Tulis	Pangkalpinang	Jumlah	12	78.400.000	- Penyediaan Alat Tulis	Pangkalpinang	Jumlah	12	78.400.000



	Kantor (ATK)					Kantor (ATK)					
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	60.000.000	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	60.000.000	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	30.000.000	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	30.000.000	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pangkalpinang	Jumlah bulan	12	7.200.000	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	7.200.000	

- Penyediaan bahan logistik kantor	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	15.600.000	- Penyediaan bahan logistik kantor	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	15.600.000
- Penyediaan makanan dan minuman	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	37.200.000	- Penyediaan makanan dan minuman	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	37.200.000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	350.000.000	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	350.000.000
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	286.090.000	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	286.090.000

	si Perkantoran										
	- Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	150.000.000	- Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	150.000.000	
2	<b>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					<b>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	156.500.000	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah paket keg.	1	156.500.000	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah paket kegiatan	12	173.000.000	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah paket kegiatan	1	173.000.000	

	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pangkalpinang	Jumlah paket kegiatan	12	421.940.000	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pangkalpinang	Jumlah paket kegiatan	12	421.940.000	
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
	- Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	30.000.000	- Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	30.000.000	
	- Advokasi perencanaan penganggaran	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	25.000.000	- Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender provinsi	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	25.000.000	

	responsif gender provinsi kepulauan bangka belitung					kepulauan bangka belitung					
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	- Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi fungsional	Pangkalpina ng	Jumlah bulan	12	250.000.000	- Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi fungsional	Pangkal pinang	Jumlah bulan	12	250.000.000	
5	<b>Program Pemanfaata n Potensi Sumber Daya Hutan</b>					<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>					

- Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Prov. Kep. Babel	Jumlah bulan	12	400.000.000	- Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Prov. Kep. Babel	Jumlah bulan	3	400.000.000	
- Sosialisasi HTI, HTR dan Peredaran Hasil Hutan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	268.500.000	- Sosialisasi HTI, HTR dan Peredaran Hasil Hutan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	268.500.000	
- Bimbingan teknis penguatan HTR dan penatausahaan hasil hutan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	293.250.000	- Bimbingan teknis penguatan HTR dan penatausahaan hasil hutan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	293.250.000	
- Observasi lapangan pembangu	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	148.150.000	- Observasi lapangan pembangunan	Pangkalpinang	Jumlah paket	12	148.150.000	

	nan hutan tanaman rakyat					hutan tanaman rakyat					
	- Pembinaan hutan tanaman rakyat	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	237.375.000	- Pembinaan hutan tanaman rakyat	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	237.375.000	
	- Bedah kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	160.000.000	- Bedah kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	160.000.000	
	- Pengembangan informasi komoditi kehutanan prioritas penyuluh kehutanan dan pelaku usaha	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	99.300.000	- Pengembangan informasi komoditi kehutanan prioritas penyuluh kehutanan dan pelaku usaha melalui potensi sumber daya	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	99.300.000	

	melalui potensi sumber daya hutan bangka belitung					hutan bangka belitung					
6	<b>Program Rehabilitasi hutan dan Lahan</b>					<b>Program Rehabilitasi hutan dan Lahan</b>					
	- Operasional KPHP dan Sarana penunjang lainnya	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	1.282.180.000	- Operasional KPHP dan Sarana penunjang lainnya	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	1.282.180.000	
	- Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	1.328.000.000	- Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	1.328.000.000	



7	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>					<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>					
	- Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Prov.Kep.Babel	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	295.150.000	- Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Prov.Kep.Babel	Bangka Belitung	Jumlah bulan	12	295.150.000	
	- Identifikasi sebaran flora dan fauna langka (TSL) di provinsi kepulauan bangka belitung	7 kabupaten kota se-provinsi kep.babel	Jumlah bulan	12	296.630.000	- Identifikasi sebaran flora dan fauna langka (TSL) di provinsi kepulauan bangka belitung	7 kabupaten kota se-provinsi kep.babel	Jumlah bulan	12	296.630.000	

	- Fasilitas Pengamanan Hutan Swakarsa Prov.Kep.Babel	Provinsi kep.babel	Jumlah bulan	12	482.260.000	- Fasilitas Pengamanan Hutan Swakarsa Prov.Kep.Babel	Provinsi kep.babel	Jumlah bulan	12	482.260.000	
	- Pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan	Provinsi kep.babel	Jumlah bulan	12	298.880.000	- Pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan	Provinsi kep.babel	Provinsi kep.babel	12	298.880.000	
	- Operasional Polisi Hutan	Provinsi kep.babel	Jumlah bulan	12	598.580.000	- Operasional Polisi Hutan	Provinsi kep.babel	Jumlah bulan	12	598.580.000	
	- Penilaian lomba PKA Wana Lestari	Provinsi kep.babel	Jumlah bulan	12	114.780.000	- Penilaian lomba PKA Wana Lestari	Provinsi kep.babel	Jumlah bulan	1	114.780.000	

	- Pembuatan pos jaga dan papan pengumuman di hutan produksi	6 kabupaten	Jumlah bulan	12	289.280.000	- Pembuatan pos jaga dan papan pengumuman di hutan produksi	6 kabupaten	Jumlah bulan	12	289.280.000	
	- Pendampingan penyuluh kehutanan untuk perlindungan dan konservasi SDA	6 kabupaten	Jumlah bulan	12	78.580.000	- Pendampingan penyuluh kehutanan untuk perlindungan dan konservasi SDA	6 kabupaten	Jumlah bulan	12	78.580.000	
	- Survey potensi dan sebaran mangrove di provinsi kep.babel	Kawasan hutan mangrove	Jumlah bulan	12	245.810.000	- Survey potensi dan sebaran mangrove di provinsi kep.babel	Kawasan hutan mangrove	Jumlah bulan	12	245.810.000	
8	<b>Program Perencanaa</b>					<b>Program Perencanaan</b>					

	<b>n dan Pengembangan Hutan</b>					<b>dan Pengembangan Hutan</b>					
	- Kegiatan Operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	189.050.000	- Kegiatan Operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	189.050.000	
	- Rapat Koordinasi Perencanaan pembangunan Kehutanan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	122.280.000	- Rapat Koordinasi Perencanaan pembangunan Kehutanan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	122.280.000	
	- Monitoring dan Evaluasi penggunaan kawasan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	347.940.000	- Monitoring dan Evaluasi penggunaan kawasan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	347.940.000	

	hutan										
	- Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kep. Babel	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	485.780.000	- Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kep. Babel	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	485.780.000	
	- Sosialisasi pemenuhan kewajiban bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	110.600.000	- Sosialisasi pemenuhan kewajiban bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	110.600.000	
	- Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Dan Tata	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	263.900.750	- Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Dan Tata Hutan Kesatuan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	263.900.750	

Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model						Pengelolaan Hutan (KPH) Model					
- Sosialisasi neraca sumber daya hutan (NSDH) provinsi kepulauan bangka belitung	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	260.770.000	- Sosialisasi neraca sumber daya hutan (NSDH) provinsi kepulauan bangka belitung	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	260.770.000		
- Pemantapan kawasan hutan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	206.205.000	- Pemantapan kawasan hutan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	206.205.000		
- Penyiapan penyusunan kelembagaan dan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	220.050.000	- Penyiapan penyusunan kelembagaan dan fokus group discussion	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	220.050.000		

	fokus group discussion pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di provinsi kepulauan bangka belitung					pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di provinsi kepulauan bangka belitung					
	- Revisi rencana kehutanan tingkat provinsi	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	149.975.000	- Revisi rencana kehutanan tingkat provinsi	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	149.975.000	
	- Koordinasi dan perencanaan pemanfaatan	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	94.950.000	- Koordinasi dan perencanaan pemanfaatan ruang dalam rencana tata	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	94.950.000	

	an ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi					ruang wilayah provinsi					
	- Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan provinsi kepulauan bangka belitung	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	223.740.000	- Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan provinsi kepulauan bangka belitung	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	223.740.000	
	- Pengembangan hutan rakyat	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	543.000.000	- Pengembangan hutan rakyat	Pangkalpinang	Jumlah bulan	12	543.000.000	
9	<b>Program peningkatan fungsi dan daya</b>					<b>Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS</b>					



	<b>dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat</b>					<b>berbasis pemberdayaan masyarakat</b>					
	- Penanaman satu milyar pohon di provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah bulan	12	369.565.000	- Penanaman satu milyar pohon di provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah bulan	12	369.565.000	
	- Rapat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja hutan desa dan hutan kemasyarakatan se-	Provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah bulan	12	176.890.000	- Rapat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja hutan desa dan hutan kemasyarakatan se-provinsi kepulauan	Provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah bulan	12	176.890.000	

	provinsi kepulauan bangka belitung					bangka belit					
	- Bimbingan teknis reklamasi dan rehabilitasi DAS pada IPPKH dan stakeholder lainnya se provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah bulan	12	249.200.000	- Bimbingan tekns reklamasi dan rehabilitasi DAS pada IPPKH dan stakeholder lainnya se provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah bulan	12	249.200.000	
	- Penyusunan DED pengelolaan ekosistem mangrove di pulau bangka	Pulau bangka	Jumlah bulan	12	383.200.000	- Penyusunan DED pengelolaan ekosistem mangrove di pulau bangka	Pulau bangka	Jumlah bulan	12	383.200.000	
<b>Total</b>					<b>26.156.732.639.73</b>					<b>26.156.732.639.73</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Kebijakan pembangunan dibidang kehutanan merupakan kebijakan yang dilakukan pada tingkat nasional dan daerah. Kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan kehutanan adalah : Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan, mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumberdaya alam, meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan, meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Kebijakan nasional dan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi sebagai penyelenggara kehutanan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2016**

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 dikaitkan dengan sasaran target kerja renstra SKPD adalah sebagai berikut:

##### **a. Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan program kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
2. Meningkatkan pengembangan kawasan Hutan Produksi melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI);
3. Meningkatkan pemberdayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
4. Meningkatkan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan;
5. Mempromosikan berbagai produk unggul dari kehutanan;
6. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS melalui upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan serta pengelolaan DAS berkelanjutan;
7. Mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan;
8. Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumber daya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam;
9. Meningkatkan pengakuan wilayah hutan adat dan terlaksananya pembangunan hutan rakyat dan perhutanan sosial dalam rangka peningkatan perekonomian;
10. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan atas status, letak batas dan luas kawasan hutan;
11. Mewujudkan operasionalisasi kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berkelanjutan;
12. Menciptakan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dalam rangka mendukung pemantapan kawasan hutan;
13. Meningkatkan pelayanan publik dalam hal pengecekan kawasan hutan di lapangan dengan lebih efektif dan efisien;
14. Mewujudkan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peraturan yang berlaku;
15. Terpeliharanya kondisi dan kualitas peralatan GIS sehingga dapat beroperasi dengan baik dalam melakukan pelayanan publik;

16. Mewujudkan SDM kehutanan provinsi yang handal dalam pengelolaan data peta kehutanan.

## **b. Sasaran**

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat beberapa prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 yaitu :

1. Tersosialisasinya pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
2. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI);
3. Terlatihnya masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
4. Tertibnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan;
5. Terpromosinya/dikenalnya produk-produk unggul dari kehutanan;
6. Terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan;
7. Terlaksananya pengelolaan DAS berkelanjutan;
8. Terlaksananya upaya reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan;
9. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat;
10. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
11. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal;
12. Berkembangnya konservasi sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan serta wisata alam berbasis masyarakat;

13. Terbangunnya hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta peningkatan usaha kehutanan;
14. Terjaminnya kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal;
15. Terbentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan terlaksananya operasionalisasi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH);
16. Terselenggaranya harmonisasi perencanaan tata ruang dalam mendukung pemantapan Kawasan Hutan (KH);
17. Tersedianya sarana dan prasarana pemetaan untuk mendukung kelancaran kegiatan penatausahaan kawasan hutan provinsi;
18. Terwujudnya penggunaan Kawasan Hutan (KH) sesuai fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku;
19. Teroperasinya peralatan GIS untuk penyediaan data dan peta kehutanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
20. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kehutanan dalam hal pengelolaan data peta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
21. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terkini;

### **3.3 Program dan Kegiatan 2016**

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Renja Perubahan tahun 2016 disesuaikan dengan rasionalisasi program/kegiatan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Bersama Gubernur dengan Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Pertemuan Tanjung Pendam pada tanggal 9 Mei 2016 dalam rangka persiapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 yang kemudian dituangkan kedalam Surat Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung Nomor : 093/530/DPPKAD tentang Penyampaian Rasionalisasi Kegiatan untuk Persiapan Penyusunan Perubahan APBD TA 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut Program/Kegiatan Renja Perubahan tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

- a. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

Rp. 384.688.650,-

- b. Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Peredaran Hasil Hutan

Rp. 161.200.000,-

- c. Bimtek Penguatan HTR dan penatausahaan hasil hutan

Rp. 245.550.000,-

- d. Observasi lapangan Pengembangan Hutan Rakyat

Rp. 121.351.000,-

- e. Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat

Rp. 202.637.650,-

- f. Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu

Rp. 100.000.000,-

- g. Pengembangan Informasi Komoditi Kehutanan Prioritas Penyuluh Kehutanan dan pelaku Usaha melalui potensi sumber daya hutan Bangka Belitung

Rp. 94.185.000,-

2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

- a. Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel

Rp. 210.500.000,-

- b. Identifikasi Sebaran flora dan fauna Langka (TSL) di Prov. Kep. Bangka Belitung

Rp. 159.980.000,-

c. Fasilitas pengaman hutan swakarsa Prov. Kep. Babel

Rp. 384.630.000,-

d. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang  
Perlindungan Hutan

Rp. 213.846.000,-

e. Operasionalisasi petugas pengaman hutan

Rp. 593.580.000,-

f. Penilaian lomba PKA Wana Lestari

Rp. 82.801.800,-

g. Pembuatan Pos Jaga dan Papan Pengumuman di Hutan Produksi

Rp. 225.300.000,-

h. Pendampingan Penyuluh Kehutanan untuk Perlindungan dan Konservasi  
SDA

Rp. 74.561.300,-

i. Survey potensi dan Sebaran Magrove di Prov. Kep. Bangka Belitung

Rp. 196.059.000,-

### 3). Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

a. Kegiatan operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan  
perpetaan

Rp. 124.050.000,-

b. Rapat koordinasi perencanaan kehutanan

Rp. 110.000.000,-

c. Monitoring dan Evaluasi penggunaan kawasan hutan

Rp. 249.704.000,-



- d. Rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-Prov. Kep. Babel  
Rp. 411.920.000,-
  - e. Sosialisasi pemenuhan kewajiban dan penyusunan basis data IPPKH  
Rp. 96.732.000,-
  - f. Sosialisasi Neraca sumber daya Hutan (NSDH) Provinsi ke Pengelola Hutan  
Rp. 233.191.000,-
  - g. Pemantapan Kawasan Hutan  
Rp. 161.730.000,-
  - h. Penyiapan penyusunan kelembagaan dan fokus Group Discussion pembangunan KPH di Prov. Kep. Babel  
Rp. 121.850.000,-
  - i. Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi  
Rp. 108.590.000,-
  - j. Koordinasi dan Perencanaan Pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi  
Rp. 69.400.000,-
  - k. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Rp. 158.740.000,-
- 4). Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Penanaman satu milyar pohon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Rp. 299.115.000,-
  - b. Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kelelak Kelukoi serta Hutan Desa (HD)  
Rp. 446.610.000,-

- c. Bimbingan Teknis Reklamasi dan Rehabilitasi DAS pada IPPKH dan Stakeholder lainnya Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
163.550.000,-
- d. Penyusunan DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pulau Bangka  
Rp. 379.200.000,-

Tabel 5

**REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN APBDTA. 2016**  
**DINAS KEHUTANANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

<b>N O.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1 <b>Belanja Pegawai</b>	<b>6,210,253,000</b>	<b>6,936,824,521</b>	<b>726,571,521</b>	Bertambah
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
1	Pelayanan Administrasi	1 Penyediaan Jasa Surat menyurat	30,000,000	30,000,000	-	
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber		144,000,000		

Perkantoran	daya air dan listrik	144,000,000		-	
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	106,370,000	176,280,000	67,960,000	Bertambah
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	43,200,000	43,200,000	-	
	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	47,800,000	47,800,000	-	
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	78,400,000	78,400,000	-	
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60,000,000	60,000,000	-	
	8 Penyediaan bahan logistik kantor	30,000,000	30,000,000	-	
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	7,200,000	7,200,000		
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,600,000	15,600,000	-	
	11 Penyediaan Makanan dan Minuman	37,200,000	37,200,000		

					-		
		12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350,000,000	350,000,000	-	
		13	Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	286,090,000	286,090,000	-	
		14	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	150,000,000	150,000,000	-	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	156,500,000	76,750,000	(79,750,000)	Berkurang
		16	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	173,000,000	-	(173,000,000)	Dihilangkan
		17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	421,940,000	335,620,000	(86,320,000)	Berkurang
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	18	Pengadaan Pakaian Dinas / Pakaian Kerja / Pakaian / Khusus dan Hari – Hari Tertentu	30,000,000	30,000,000	-	

		19	Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov. Kep. Bangka Belitung	25,000,000	17,150,000	(7,850,000)	Berkurang
4	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	20	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	250,000,000	100,000,000	(150.000.000)	Berkurang
			<b>Total Belanja Urusan Wajib (Rutin) (I)</b>	<b>2,412,300,000</b>	<b>1,983,340,000</b>		
5	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	400,000,000	384,688,650	(15,311,350)	Berkurang
		2	Sosialisasi HTI, HTR dan Peredaran dan Hasil Hutan	268,500,000	161,200,000	(107,300,000)	Berkurang
		3	Bimbingan Teknis Penatausahaan hasil hutan	293,250,000	245,550,000	(47,700,000)	Berkurang
		4	Observasi Lapangan Pengembangan Hutan Rakyat	148,150,000	121,351,000	(26,799,000)	Berkurang
		5	Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat	237,375,000	202,637,6000	(34,737,400)	Berkurang

					)		
		6	Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	160,000,000	100,000,000	(60,000,000)	Berkurang
		7	Pengembangan Informasi komoditi kehutanan Prioritas penyuluh kehutanan dan pelaku Usaha melalui potensi sumber daya hutan Bangka Belitung	99,300,000	94,185,000	(5,115,000)	Berkurang
6	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	8	Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel	295,150,000	210,500,000	(84,650,000)	Berkurang
		9	Identifikasi sebaran flora dan fauna langka (TSL) di Prov. Babel	296,630,000	158,980,000	(137,650,000)	Berkurang
		10	Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov. Kep. Babel	482,260,000	384,630,000	(97,630,000)	Berkurang, perubahan nomenklatur dengan judul baru : Pengamanan Hutan Swakarsa Prov. Kep. Babel
		11	Pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan	298,880,000	213,846,000	(85,034,000)	Berkurang
						)	

		bidang perlindungan hutan				
		12 Operasionalisasi Polisi Hutan	598,580,000	593,580,000	(5,000,000)	Berkurang, perubahan nomenklatur dengan judul baru : Peningkatan Fungsi Pengamanan Hutan
		13 Penilaian lomba PKA Wana Lestari	114,780,000	82,801,800	(31,978,200)	Berkurang
		14 Pembuatan pos jaga dan papan pengumuman di hutan produksi	289,280,000	225,300,000	(63,980,000)	Berkurang
		15 Pendampingan peyuluh kehutanan untuk perlindungan dan konservasi SDA	78,580,000	74,561,300	(4,018,700)	Berkurang
		16 Survey potensi dan sebaran mangrove di Prov. Babel	245,810,000	196,059,000	(49,751,000)	Berkurang
7	Perencanaan dan Pengembangan	17 Kegiatan operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan	189,050,000	124,050,000	(65,000,000)	Berkurang, perubahan nomenklatur dengan judul Penyediaan Data



Hutan					dan Informasi Kawasan Hutan melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan	
	18	Rapat Koordinasi Perencanaan Kehutanan	122,280,000	110,000,000	(12,280,000 )	Berkurang
	19	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	347,940,000	249,704,000	(98,236,000 )	Berkurang
	20	Rekonsiliasi data dan informasi pembangunan Kehutanan se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	485,780,000	411,920,000	(73,860,000 )	Berkurang
	21	Sosialisasi pemenuhan kewajiban dan penyusunan basis data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	110,600,000	96,732,000	(13,868,000 )	Berkurang
	22	Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model	263,900,750	27,579,000	(236,321,750)	Berkurang
	23	Sosialisasi Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) Provinsi ke Pengelola Hutan	260,770,000	233,191,000	(27,579,000 )	Dihilangkan

8	Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung DAS Berbasis	24	Pemantapan kawasan hutan	206,205,000	161,730,000	(44,475,000 )	Berkurang
		25	Penyiapan penyusunan kelembagaan dan focus group discussion pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Prov. Kep. Babel	220,050,000	121,850,000	(98,200,000 )	Berkurang
		26	Revisi rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	149,975,000	108,590,000	(41,385,000 0)	Berkurang
		27	Koordinasi dan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tat ruang wilayah provinsi	94,950,000	69,400,000	(25,550,000 )	Berkurang
		28	Monitoring dan evaluasi Pembangunan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	223,740,000	158,740,000	(65,000,000 )	Berkurang
		29	Penanaman satu milyar pohon di Prov. Kep. Babel	369,565,000	299,115,000	(70,450,000 )	Berkurang

Pemberdayaan Masyarakat						
	30	Pembinaan dan pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan dan kelekak klukoi serta Hutan Desa	468,610,000	446,610,000	(40,000,000 )	Berkurang
	31	Rapat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja hutan dan kemasyarakatan se-Prov. Kep. Babel	176,890,000	3,194,200	(173,695,800)	Dihilangkan
	32	Bimtek reklamasi dan rehabilitasi DAS pada IPPKH dan stakeholder lainnya se-Prov. Kep. Babel	249,200,000	163,550,000	(85,650,000 )	Berkurang
	33	Penyusunan DED Pengelolaan ekosistem mangrove di Pulau Bangka	383,200,000	379,200,000	(4,000,000)	Berkurang
		Jumlah Belanja Urusan Pilihan (II)	8,647,230,750	6,615,025,550	2,032,205,200	Berkurang
		<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>11,059,530,750</b>	<b>8,598,365,550</b>	<b>2,461,165,200</b>	<b>Berkurang</b>
		<b>TOTAL</b>				

		17,269,783,750	15,796,099,071	1,473,684,679	Berkurang
--	--	----------------	----------------	---------------	-----------

**Tabel 6**

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN PERUBAHAN MAJU TAHUN 2017  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SKPD: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Urusan	Program dan	Indikator	Rencana Tahun 2016	Catatan	Perkiraan Perubahan
--------	-------------	-----------	--------------------	---------	---------------------

Pemerintahan	Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan					Penting	Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Wajib</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan surat yang terkirim	Pangkalpinang	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	30.000.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkalpinang	12 bulan	114.000.000	APBD		12 bulan	114.000.000

	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	Pangkalpinang	18 orang	106.370.000	APBD		19 orang	174.330.000
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	Pangkalpinang	12 bulan	43.200.000	APBD		12 bulan	43.200.000
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Pangkalpinang	12 bulan	47.800.000	APBD		12 bulan	47.800.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah bulan Tersedianya Alat Tulis kantor (ATK)	Pangkalpinang	12 bulan	78.400.000	APBD		12 bulan	78.400.000

	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pangkalpinang	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	60.000.000
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Pangkalpinang	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	30.000.000
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Pangkalpinang	12 bulan	7.200.000	APBD		12 bulan	7.200.000
	- Penyediaan	Tersedianya	Pangkalpinang	12 bulan	15.600.000	APBD		12 bulan	15.600.000

	Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor	ang						
	- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan Tersedianya makanan dan minuman	Pangkalpinang	12 bulan	37.200.000	APBD		12 bulan	37.200.000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan tersedianya rakor dan konsultasi ke luar daerah	Pangkalpinang	12 bulan	350.000.000	APBD		12 bulan	350.000.000
	- Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang	12 bulan	286.090.000	APBD		12 bulan	286.090.000



	- Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Jumlah bulan ketersedian a koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Pangkalpinang	12 bulan	150.000.000	APBD		12 bulan	150.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
	- Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pangkalpinang	1 Mesin cetak (Plotter / alat cetak peta dan perlengkapannya), 1 Genset, 6	156.500.000	APBD		12 bulan	76.750.000

				Komputer, 5 Scanner, 1 Bendera dan Tiang Bendera, 1 Jaringan Komputer (LAN)					
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	Pangkalpin ang	12 bulan	173.000.000	APBD		12 bulan	-
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasi onal	Pangkalpin ang	12 bulan	421.940.000	APBD		5 Laptop, 7 Kamera	335.620.000
	<b>Program Peningkatan</b>								

	<b>Disiplin Aparatur</b>								
	- Pengadaan Pakaian Dinas/pakaian kerja/pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Jumlah tersedianyan pakaian dinas untuk 60 pegawai	Pangkalpinang	120 stel	30.000.000	APBD			30.000.000
	- Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender Prov. Kep. Bangka Belitung		Pangkalpinang		25.000.000	APBD			17.150.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>								

	<b>Sumber Daya Aparatur</b>								
	- Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis bidang kehutanan	Pangkalpinang dan luar daerah	Aparatur / SDM Dishut	250.000.000	APBD		Aparatur / SDM Dishut	100.000.000
	<b>Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan</b>								
	- Pengembangan Industri dan pemasaran hasil hutan	Terlaksananya promosi produk unggulan HHK dan HHBK	Jakarta		400.000.000	APBD			384.688.650

	- Sosialisasi HTI dan peredaran hasil hutan	Terlaksananya sosialisasi HTI dan peredaran hasil hutan	1 Provinsi dan 6 Kabupaten	50 orang	268.500.000	APBD			161.200.000
	- Bimtek penguatan HTR dan penatausahaan hasil hutan	Terlatihnya pendampingan HTR dan pemegang IUPHHK HTR dan terlatihnya petugas penatausahaan hasil hutan	6 Kabupaten	40 orang	293.250.000	APBD			245.550.000
	- Observasi lapangan Pengembang				148.150.000	APBD			121.351.000

	n Hutan Rakyat								
	-Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Terlaksana pembinaan program HTR pada kelompok pemegang izin IUPHHK	1 Provinsi		237.375.000	APBD			202.637.600
	-Bedah kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	Teridentifikasi kendala dan masalah pembangunan HTI	6 Kabupaten		160.000.000	APBD			100.000.000
	- Pengembangan informasi komoditi kehutanan prioritas	Meningkatnya komoditi dan koperasi kehutanan HHBK	1 Provinsi		99.300.000	APBD			94.185.000

	penyuluh kehutanan dan pelaku usaha melalui potensi sumber daya hutan Bangka Belitung								
	<b>Program perlindungan dan konservasi SDA</b>								
	- Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di	Terselenggaranya perlindungan hutan secara terpadu	1 Provinsi	6 Kabupaten	295.150.000	APBD			195.000.000

	Prov. Kep. Babel								
	- Identifikasi sebaran flora dan fauna langka (TSL) di Prov. Babel	Tersedianya data dan tertib serta terfasilitasinya penangkaran satwa dan tumbuhan endemik di Prov. Kep. Babel	1 Provinsi		296.630.000	APBD			205.380.000
	- Fasilitas pengamanan hutan swakarsa Prov. Kep. Babel	Terlaksananya pamhutan swakarsa kabupaten	6 Kabupaten	60 orang	482.260.000	APBD			383.630.000
	- Pengendalian	Terlaksananya	1 provinsi	160	298.880.000	APBD			185.000.000



	n kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidangperlindungan hutan	a pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan		orang					
	- Operasionalisasi Polisi Hutan	Terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan	1 provinsi	6 kabupaten	598.580.000	APBD			593.580.000
	- Penilaian lomba PKA Wana Lestari	Terlaksananya keberhasilan PKA wana lestari	Provinsi	Polhut dan Kader Konservasi	114.780.000	APBD			82.801.800
	- Pembuatan	Tersedianya	1 lokasi	1	289.280.000	APBD			225.300.000

	pos jaga dan papan pengumuman di hutan produksi	dokumen site plan pengelolaan ekosistem mangrove		dokumen					
	- Pendampingan peyuluh kehutanan untuk perlindungan dan konservasi SDA	Terdorongnya masyarakat dalam perlindungan SDA	1 provinsi	-	78.580.000	APBD			74.561.300
	- Survey potensi dan sebaran mangrove di Prov. Babel	Teridentifikasinya sebaran mangrove di Prov. Kep. Babel	1 provinsi	-	245.810.000	APBD			150.000.000
	<b>Program</b>								

	<b>Perencanaan dan pengembangan hutan</b>								
	- Rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan	Pangkalpinang	4 bulan	122.280.000	APBD		4 bulan	110.000.000
	- Rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-Provinsi Kep. Babel	Terlaksananya rekon data dan informasi kehutanan Provinsi	Kabupaten /Kota	1 Dokumen	485.780.000	APBD		1 Dokumen	411.920.000
	- Sosialisasi pemenuhan kewajiban	Jumlah peserta sosialisasi	Pangkalpinang dan luar	30 Perusahaan	110.600.000	APBD		40 Perusahaan	96.732.000

	bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan	bagi pemegang IPPKH	daerah						
	- Sosialisasi neraca sumber daya hutan provinsi ke pengelola hutan	Jumlah peserta sosialisasi	Pangkalpinang	30 orang	260.770.000	APBD		50 orang	150.000.000
	- Revisi rencana kehutanan tingkat Provinsi	Tersedianya dokumen RKTP	Provinsi		149.975.000	APBD		1 Dokumen	108.590.000
	- Penyiapan	Terlaksananya	1 provinsi	2	220.050.000	APBD		1 laporan	121.850.000

	penyusunan kelembagaan dan pembangunan KPH Provinsi	a penyusunan kelembagaan dan pembangunan KPH Prov. Babel		dokumen perencanaan					
	- Pemantapan kawasan hutan	Tersedianya kondisi batas kawasan hutan terkini dan terciptanya kesepakatan aparaturnya terhadap aspek yang terkait dengan IP4T	1 Provinsi	65 km	206.205.000	APBD		30 orang dan data kondisi batas 90 km trayek batas luar	161.730.000
	- Koordinasi	Tersedianya	1 Provinsi		94.950.000	APBD		1 laporan	69.400.000

	dan perencanaan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi	buku laporan perencanaan pemanfaatan ruang dalam RTRW							
	- Operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan pemetaan	Tersedianya peta kawasan hutan dan operasional peralatan dan perpetaan	1 Provinsi	10 bulan	189.050.000	APBD		10 bulan	124.050.000
	- Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	Terlaksanya evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban izin pinjam pakai	1 Provinsi	6 Perusahaan	347.940.000	APBD		6 Perusahaan	249.704.000

		kawasan hutan (IPPKH)							
	- Konsultasi publik rencana pengelolaan dan tata Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya pengelolaan hutan di tingkat tapak yang optimal oleh perangkat KPH beserta masyarakat sekitar	1 Provinsi	4 KPH Model	263.900.750	APBD		4 KPH	150.000.000
	- Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan provinsi kepulauan bangka		Pangkalpinang		223.740.000	APBD			158.740.000

	Belitung								
	<b>Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat</b>								
	- Penanaman satu milyar pohon di Prov. Kep. Babel	Terlaksananya penanaman pohon dalam mendukung rehabilitasi hutan dan lahan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	10 juta pohon	369.565.000	APBD		10 juta pohon	299.115.000
	- Pembinaan dan pemeliharaan Hutan	Terpeliharanya areal HKm dalam kawasan	1 Provinsi	6 Kabupaten	486.610.000	APBD		6 Kabupaten	446.610.000



	Kemasyarakatan dan kelekak klukoi serta Hutan Desa	hutan dan kelekak kelukoi							
	- Rapat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja hutan dan kemasyarakatan se-Prov. Kep. Babel	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya rencana kerja HD dan HKm	Pulau Bangka	-	176.890.000	APBD		45 peserta dan 6 dokumen renja	3.194.200
	- Bimtek reklamasi dan rehabilitasi DAS pada IPPKH dan	Terlaksananya bimtek reklamasi dan rehabilitasi	Pulau Belitung	-	249.200.000	APBD		60 peserta, 2 dokumen rencana reklamasi	163.550.000

	stakeholder lainnya se- Prov. Kep. Babel	DAS							
	- Penyusunan DED Pengelolaan ekosistem mangrove di Pulau Bangka	Tersedianya dokumen DED Pengelolaan ekosistem mangrove di Pulau Bangka	Bangka Tengah	-	383.200.000	APBD		1 dokumen	379.200.000
<b>TOTAL</b>					<b>17.269.783. 750</b>				<b>15.529.415. 071</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 disusun berdasarkan Rasionalisasi Program Kegiatan serta Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017. Dengan dukungan segenap sumber daya Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi atau lembaga yang terkait, dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, diharapkan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan 2016 dapat terlaksana untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menjadi catatan penting terkait dengan program kegiatan dalam Renja Perubahan 2016 adalah ada beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan, ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi realisasi target yang direncanakan, serta kegiatan yang sudah memenuhi realisasi target kegiatan. Harapan kami juga realisasi pagu anggaran nanti sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan, atau minimal sedikit berbeda, walaupun ada program kegiatan yang belum disetujui panitia anggaran eksekutif maupun legislatif, kami yakin kedua panitia tersebut akan menyeleksinya dengan pertimbangan yang baik.

Pangkalpinang, Juni 2016  
Kepala Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Ir. Nazalyus, M.Si  
NIP. 19590824 198603 1 009